

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Aviandari, D. 2010. *Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu*. Yogyakarta: Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
- Eka, DR. 2010. *Diktat Metod Penelitian Sosial*, Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY. Yogyakarta: Fisipol UMY.
- Erwan Agus dan Dyah Rati, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012
- Fultoni, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2008). *Kebijakan Publik "Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III"*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and society* 6, 1975, London: Sage.
- Moleong, L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, D. dan Zaenuddin, A. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsi Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1992. *Metode Penelitian Survey*., Jakarta: LP3ES
- Purwanto, Erwan Agus P. d. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Natsir, M. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gehalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Suharto, E. 2005. PhD. "*Analisis Kebijakan Publik*". Bandung: ALFABETA.
- Sunarno, S. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S 2005. *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo.
- Widjaja HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal

- Anggraeni R. dkk, 2013, *Evaluasi kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengaduan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No.1, download.portalgaruda.org/article.php, diakses tanggal 7 November 2016 pukul 19.30 wib.
- Prof.Dr.Sri Suwitri,M.Si. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Modul/MAPU5301, 1.09, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf>. Diakses tanggal 9 September 2017
- Wirawan J. 2014. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Yogyakarta Tahun 2012 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta.
- Winarno K. 2013. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, <http://jurnal.ugm.ac.id/jkki/download/3219/2841>, diakses pada 7 November 2016 pukul 19.00 wib.
- PDFiozc, "*Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 201*", <http://pdfiozc.org/k-49028938.html>, diakses tanggal 1 Mei 2017
- Ramdhani, Abdullah - Muhammad Ali Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12. Diakses tanggal 1 September 2017 pukul 19.30 wib.
- Suwitri, S. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses tanggal 1 September 2017 pukul 19.30 wib.

Skripsi

- Istana. 2014. *Peran Partai Politik Dalam Formulasi Kebijakan Publik Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo Periode 2010-2012*. Thesis. Yogyakarta.

Muttaqin, MA. 2016. *Evaluasi Kebijakan Promosi Dan Mutasi PNS Di Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2010-2015*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi

Peraturan

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak No.13 Tahun 2010 Tentang Desa dan Kelurahan Layak Anak.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

Referensi Internet

Slemankec.slemankab.go.id, "Evaluasi KLA",
https://www.academia.edu/10081498/KOTA_LAYAK_ANAK_UPAYA_LIBERALI_SASI_ANAK. Diakses 25 April. Pukul 20.00 wib.

http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/omx4ypr291. Diakses 6 Mei 2017

https://www.google.co.id/amp/m.republik.co.id/amp_version/omx493359. Diakses 6 Mei 2017

<http://www.ykai.net/index>. Diakses 25 April 2017 pukul 20.00 wib

http://www.academia.edu/24539839/Mengembangkan_Desa_Ramah_Anak. Diakses 13 Juni. Pukul 04.30 wib.

<http://m.harianamanah.id/berita-targetkan-raih-kla-nindya-dinas-p2ap2kb-dorong-gugus-tugas-ramah-anak-hingga-ke-desa.html>. Diakses 16 Mei 2017 pukul 19.00

<http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>. Diakses 13 November 2017. Pukul 08.00 wib.

<http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2017

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/19/ok0kfs383-polres-sleman-akan-tindak-tegas-pelaku-kenakalan-remaja>. Diakses pada tanggal 14 November 2017, 03:40

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017

SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Bersama Lindungi Anak
(BERLIAN) Tahun 2017